

**Sepak Terjang PITI Jawa Timur di Tengah Pusaran Hubungan
Bilateral Indonesia-Tiongkok**

Eva Putriya Hasanah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Jawa Timur dalam membantu pemerintah Tiongkok mempererat hubungan bilateral dengan pemerintah Indonesia. Melalui metode kualitatif-deskriptif dan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara, penulis menemukan empat peran PITI dalam diplomasi publik. Pertama, PITI membantu memperkenalkan budaya Tiongkok kepada masyarakat Indonesia. Selain itu, PITI turut memfasilitasi pengenalan identitas Tionghoa muslim. Ketiga, PITI terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Keempat, PITI menjadi mediator antara pemerintah Tiongkok dengan berbagai pihak di Indonesia. Meskipun berperan penting dalam diplomasi publik yang dapat membantu pemerintah Tiongkok di Indonesia, PITI merupakan organisasi masa Islam yang berdiri sendiri tanpa memiliki keterkaitan dengan pemerintah maupun politik, termasuk hubungan politik dengan pemerintah Tiongkok.

Kata Kunci: PITI, Strategi, Tiongkok, Indonesia, Diplomasi

Pendahuluan

Indonesia memiliki hubungan sejarah yang panjang dengan Tiongkok. Kedatangan orang-orang Tiongkok ke Pulau Jawa pada masa Dinasti Han (206 SM – 220 M) menjadi awal bagi hubungan kedua negara.¹ Dalam perkembangannya, hubungan Indonesia dan Tiongkok tidak hanya berpusat pada pemerintah, tetapi telah mengakar dalam masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh adanya jejak-jejak akulturasi budaya yang banyak ditemukan di masyarakat, seperti motif kain sutera Tiongkok yang memengaruhi Candi Sewu di Yogyakarta.² Selain itu, keberadaan tiga belas Masjid Cheng Hoo di berbagai kota besar di Indonesia turut menjadi saksi berbaurnya masyarakat Indonesia dengan orang-orang Tiongkok.

Di era paska kemerdekaan, peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) menjadi sebuah catatan buruk bagi sejarah hubungan Indonesia-Tiongkok. Akibat peristiwa ini, timbullah kekerasan anti-komunis yang berubah menjadi gerakan anti-Tiongkok yang berujung pada *pembekuan* hubungan diplomatik pada 30 Oktober 1967.³ Saat itu Tiongkok dianggap sebagai ancaman bagi keamanan dan kestabilan negara. Hal ini ikut menyulut kemarahan rakyat Indonesia, sehingga apapun yang berhubungan dengan Tiongkok akan diidentikkan dengan ancaman komunisme, termasuk minoritas Tionghoa. Puncak penolakan terhadap etnis Tionghoa terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 tahun 1967 melarang segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa.⁴ Masyarakat Tionghoa juga diharuskan mengadopsi nama yang bercirikan Indonesia sesuai dengan Surat Edaran No. 06/Preskab/6/67.⁵

¹ Ririn Darini, "Nasionalisme Etnis Tionghoa di Indonesia, 1900-1945," *MOZAIK* 3, no. 1 (2008): 1-12.

² Rustopo, *Jawa Sejati, Otobiografi Go Tik Swan* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008).

³ Rizal Sukma, "Hubungan Indonesia-Tiongkok: Jalan Panjang Menuju Normalisasi," dalam Bantarto Bandoro, *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru* (Jakarta: CSIS, 1994), 55.

⁴ Muhammad A. S. Hikam, *Politik Kewarganegaraan: Landasan Pendemokratisasi di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1999).

⁵ Surya Putra, *Agamaku Terbang Tinggi* (Surabaya: Inspirasi, 2001), 71.

Penandatanganan *Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on the Resumption of Diplomatic Relations* tanggal 8 Agustus 1990 menjadi titik balik hubungan kedua negara. Namun, normalisasi yang seutuhnya baru terjadi paska Reformasi ketika Tionghoa Indonesia mendapatkan kembali hak-haknya. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencabut Inpres No. 14/1967 dan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang memberikan kebebasan kepada masyarakat Tionghoa untuk melakukan ritual keagamaan, tradisi, dan budaya yang sebelumnya dilarang.⁶ Hubungan antara Jakarta dan Beijing pun semakin membaik yang ditandai dengan kesepakatan *Comprehensive Strategic Partnership* (Kemitraan Strategis Komprehensif) pada tahun 2013.

Menjaga hubungan Indonesia-Tiongkok tidak cukup hanya dengan mengandalkan kontak antarpemerintah. Dinamika politik yang semakin kompleks membuat peran aktor-aktor non-tradisional semakin signifikan, termasuk warga Tionghoa Indonesia. Di antara organisasi-organisasi Tionghoa yang ada di Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) menempati posisi yang lebih strategis. Pertama, PITI tidak dapat dipisahkan dari etnis Tionghoa sehingga ia akan selalu dianggap sebagai representasi Tiongkok. Pada 15 Desember 1972, PITI harus berganti nama menjadi Pembina Iman Tauhid Islam akibat dilarangnya penggunaan nama etnis oleh pemerintahan Orde Baru.⁷ Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Institute of Southeast Asian Studies* (ISEAS) Singapura, sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa tampak dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.⁸ Sentimen ini, menurut Eep Saefulloh Fatah, juga menjadi salah satu faktor kekalahan Basuki Tjahaya

⁶ Bayu Galih, "Peran Gus Dur di Balik Kemeriahan Imlek," *Kompas*, 30 Januari 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/30/06060031/peran.gus.dur.di.balik.kemeriahan.imlek>.

⁷ Khozyn Arief, "Sejarah dan Perkembangan PITI: Kiprah PITI di Gelanggang Nasional," Makalah dipresentasikan dalam Seminar dan Musyawarah Wilayah PITI DIY, 1994, 5.

⁸ Akhmad Muawal Hasan, "Sentimen Anti-Cina di Indonesia Awet Usai Pilkada Jakarta," *Tirto*, 12 September 2017, <https://tirto.id/sentimen-anti-cina-di-indonesia-awet-usai-pilkada-jakarta-cwpg>

Purnama (Ahok).⁹ Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden tahun 2018, sentimen anti-Tiongkok, misalnya isu kebangkitan komunisme, ikut menyeret etnis Tionghoa dalam pusaran politik kebencian. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih mengaitkan etnis Tionghoa dengan Tiongkok.

Kedua, sebagai organisasi Tionghoa muslim, PITI dapat dianggap sebagai bagian dari mayoritas penduduk Indonesia. Ketiga, PITI memiliki pengalaman berorganisasi yang panjang sejak didirikan pada tahun 1961. Menurut AD/ART lembaga, visi PITI adalah untuk mewujudkan Islam yang *rahmatan lil alamin* (Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam). Sedangkan misinya adalah untuk mempersatukan berbagai kalangan, antara lain Tionghoa muslim dengan muslim lainnya di Indonesia, Tionghoa muslim dengan etnis Tionghoa non-muslim, dan etnis Tionghoa dengan umat Islam.¹⁰ Dengan kata lain, peran PITI tidak hanya terbatas pada penyiaran agama Islam, tetapi juga peran sosial dalam menjembatani berbagai kalangan demi menghapuskan kesalahpahaman yang melekat antara etnis Tionghoa dan masyarakat Indonesia. Selain itu, PITI juga memiliki peran strategis sebagai penghubung Indonesia dan Tiongkok. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PITI Jawa Timur, H. Haryanto Satryo, menyatakan bahwa PITI sering diundang ke acara pemerintah Tiongkok dan berdiskusi secara nonformal dengan mereka.¹¹

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada peran PITI dalam dakwah Islam di berbagai daerah di Indonesia, misalnya Banyumas, Medan dan Semarang, baik yang ditujukan pada warga Tionghoa non-Muslim (Islamisasi) maupun yang Muslim (pengajian rutin).¹² Selain dakwah, PITI juga membantu mempersatukan Tionghoa

⁹ Ibid.

¹⁰ PITI, *AD/ART/PITI Tahun 2012-2017*, 7.

¹¹ H. Haryanto Satryo (Ketua DPW PITI Jatim), dalam sebuah wawancara dengan penulis, 5 Oktober 2018.

¹² Zakiyatul Fahiroh, "Pelaksanaan Dakwah Organisasi Persatuan Islam Tionghoa (PITI) Banyumas," (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2016); Abdi Sahrial Harahap, "Dinamika Gerakan Dakwah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Medan, Sumatera Utara," *Analytica Islamica* 1, no. 2 (2012): 215-241; Moh. Muhyidin, "Peran PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) terhadap Islamisasi di Indonesia,"

Muslim dengan masyarakat lain.¹³ Hal ini tidak terlepas dari pendekatan moderat yang dilakukan PITI, sehingga dapat diterima oleh warga setempat.¹⁴ Penelitian terkait juga menyoroti kontribusi Masjid Cheng Hoo untuk memperkuat hubungan Indonesia-Tiongkok.¹⁵ Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara khusus peran PITI dalam membantu pemerintah Tiongkok mempererat hubungan bilateral dengan pemerintah Indonesia. Sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Lutfiya Al-Qarani, penulis fokus pada PITI Jawa Timur sebagai pokok bahasan.¹⁶ Namun, jika Al-Qarani menganalisis dampak hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok (*Strategic Partnership Agreement*) terhadap PITI Jawa Timur dari segi sosial dan budaya, maka penulis berpendapat sebaliknya. Penulis menganggap PITI Jawa Timur memiliki peran aktif dalam pendekatan *people-to-people* atau diplomasi publik yang menguntungkan pemerintah Tiongkok di Indonesia. Peran tersebut terbagi dalam empat aspek: sosial, agama, budaya, dan hubungan internasional.

Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep *soft power* dan *multi-track diplomacy*. Salah satu jenis *soft power* adalah diplomasi publik, di mana pemerintah tidak lagi memonopoli aktivitas diplomasi seiring dengan munculnya aktor-aktor non-negara.¹⁷ Diplomasi publik dilakukan sebagai upaya memengaruhi orang atau organisasi lain di luar negara agar mengubah cara pandang mereka terhadap negara

(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017); Johan Wahyudi, "Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Semarang 1986-2007," (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

¹³ H. Budisetyagraha, "Dakwah Islam di Kalangan Etnis Tionghoa untuk Mengokohkan Integrasi Bangsa," *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 1, no. 1 (2000): 19-27.

¹⁴ Rosmini, Syamsidar, dan Haniah, *Geliat Keberagaman Moderat Komunitas Muslim Tionghoa: Studi Kontribusi Pengkajian Islam Intensif dalam Keberagaman Moderat Muslim Tionghoa Kota Makassar* (Makassar: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Rumah Buku Carabaca, 2015).

¹⁵ Choirul Mahfud, "The Role of Cheng Ho Mosque: The New Silk Road, Indonesia-China Relations in Islamic Cultural Identity," *Journal of Indonesian Islam* 8, no. 1 (2014): 23-38.

¹⁶ Lutfiya Al-Qarani, "Dampak Sosial dan Budaya pada Perjanjian *Strategic Partnership Agreement* Indonesia-Tiongkok terhadap Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Jawa Timur," (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

¹⁷ Joseph S. Nye, "Public Diplomacy and Soft Power," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 616, no. 1 (2008): 94-109.

tersebut melalui cara yang positif.¹⁸ Bagaimana aktor-aktor non-tradisional menjalankan fungsi diplomasinya bergantung pada jenis jalur (*track*) yang tersedia. Diplomasi multi-jalur digunakan ketika pemerintah dianggap tidak dapat menangani kompleksitas masalah dalam semua aspek, sehingga dibutuhkan peran aktor lain untuk ikut serta dalam proses diplomasi. Menurut Louise Diamond dan John McDonald, diplomasi jenis ini merupakan manifestasi kerangka proses perdamaian internasional dan refleksi atas berbagai kegiatan yang dilakukan dalam proses penciptaan perdamaian tersebut.¹⁹ Diplomasi yang dilakukan oleh aktor non-negara tidak berarti menggantikan diplomasi *state-to-state*, melainkan membantu membangun jalan bagi komunikasi dan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah (*Track 1*).²⁰ Artikel ini mengategorikan PITI Jawa Timur sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) yang bermain di *Track 2*, di mana ia dianggap sebagai perpanjangan tangan diplomasi pemerintah.²¹ Namun, sebagai aktor *Track 2*, PITI Jawa Timur tidak terikat oleh kekuatan politik maupun konstitusi, sehingga tidak memengaruhi sudut pandang mereka. Pun, ia tidak memiliki kuasa untuk memengaruhi kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah Tiongkok.²² Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua PITI Jawa Timur, keberadaan PITI dianggap berperan dalam melakukan pendekatan terhadap orang-orang Indonesia yang mayoritas beragama Islam.²³ Meskipun bukan organisasi politik, PITI Jawa Timur tetap memiliki hubungan dengan pemerintah Tiongkok. Oleh karena itu, menurut penulis, pemerintah Tiongkok telah melibatkan

¹⁸ Citra Hennida, *Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri* (Surabaya: Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga).

¹⁹ Louise Diamond dan John McDonald, *Multi-track Diplomacy: A System Approach to Peace, Third Edition* (New York: Kumarian Press, 1996).

²⁰ Karolina Kupinska, "Contemporary Multi-track Diplomacy across the Taiwan Strait," (Tesis Magister, Graduate School of International Affairs, Ming Chuan University, 2010).

²¹ Daniel Wehrenfenning, "Multi-track Diplomacy and Human Security," *Human Security Journal* 7, no. 7 (2008): 80-86.

²² Jeffrey Mapendere, "Track One and a Half Diplomacy and the Complementarity of Tracks," *Culture of Peace Online Journal* 2, no. 1 (2006): 66-81.

²³ H. Haryanto Satryo, dalam sebuah wawancara dengan penulis, 5 Oktober 2018.

PITI Jawa Timur dalam strategi diplomasi publik demi mempererat hubungannya dengan pemerintah Indonesia.

Secara akademis, penulis berharap dapat berkontribusi bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional di era kontemporer, khususnya peran aktor non-negara (PITI) dalam membantu mempererat hubungan antarnegara (Indonesia-Tiongkok). Studi ini juga diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia maupun Tiongkok untuk mempertimbangkan peran PITI dalam proses pengambilan kebijakan. Di sisi lain, mengingat perannya yang strategis, PITI diharapkan dapat menyinergikan kegiatan-kegiatannya dengan kebijakan pemerintah Indonesia.

Artikel ini dibagi ke dalam beberapa pembahasan. Pertama, penulis menjabarkan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, penulis memaparkan hasil analisis data. Bagian penutup berupa kesimpulan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki data-data bukan angka, namun berupa kata atau kalimat dan gambar yang diperoleh dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data-data dalam penelitian kualitatif ini bisa berupa memo, catatan lapangan, video, dokumen pribadi, naskah wawancara, foto, atau dokumentasi resmi lainnya.²⁴ Desain deskriptif mempermudah proses analisis terhadap fenomena dalam penelitian ini dengan cara pemaparan data-data yang ditemukan oleh peneliti.

Untuk menarik suatu kesimpulan dari suatu fenomena tertentu dalam penelitian kualitatif, pola pikir induktif menjadi gambaran bagi rangkaian proses penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Cara berpikir dalam rangka menarik kesimpulan dari yang khusus ke yang bersifat umum ini disebut sebagai berpikir induktif.²⁵ Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran utuh dari permasalahan

²⁴ Laxi Maleong, *Meode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rosda Karya, 1994), 56.

²⁵ John M. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 61.

penelitian dengan cara memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya.

Penelitian ini memadukan dua teknik pengumpulan data: dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi akan membantu penulis memperoleh data sekunder berupa, antara lain, laporan keuangan, hasil penelitian, dan undang-undang.²⁶ Melalui wawancara jenis *snowball* untuk memperoleh data primer, penulis menentukan narasumber kunci terkait topik penelitian dan akan meminta nama-nama narasumber lain yang relevan untuk diwawancarai.²⁷ Penelitian ini dilaksanakan di kantor PITI Jawa Timur dan Konsulat Jenderal (Konjen) Tiongkok di Kota Surabaya dengan rentang waktu antara bulan Oktober 2018 sampai bulan Agustus 2019.

Untuk analisis data, penulis menggunakan teknik Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).²⁸ Di tahap pertama, penulis melakukan pengelompokkan dan pemilahan data sesuai dengan topik permasalahan penelitian. Penulis kemudian menyajikan data dengan cara menguraikannya dalam bentuk teks naratif untuk masing-masing pola, kategori, fokus, dan tema yang hendak dipahami pokok persoalannya.²⁹ Selanjutnya penulis menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah PITI dapat ditarik jauh ke masa sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1931 Haji Yap Siong yang berasal dari kota Moyon, Tiongkok memeluk agama Islam dan membentuk sebuah organisasi dakwah yang disebut dengan PIT (Persatuan Islam

²⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 85.

²⁷ Joko Subagyo P., *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 31.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 32.

²⁹ Ibid.

Tionghoa). Organisasi ini dibentuk di kota Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada tahun 1953 dibentuk lah PTM (Persatuan Tionghoa Muslim) sebagai organisasi bagi orang-orang Tionghoa Islam di Jakarta yang diketuai oleh Kho Guan Tjin. Karena PIT dan PTM masih bersifat local, maka keduanya memutuskan untuk melebur menjadi PITI supaya dapat mencakup seluruh Tionghoa muslim di Indonesia. Perbedaan internal tentang keikutsertaan dalam politik menyebabkan pembubaran PITI pada tahun 1955.³⁰ Didorong oleh semangat dakwah Tionghoa muslim, PITI kembali dibentuk pada 14 April 1961 di Jakarta untuk mempersatukan etnis Tionghoa dengan Tionghoa muslim, muslim Indonesia dengan Tionghoa muslim, dan Indonesia asli dengan etnis Tionghoa.³¹

Meski PITI merupakan organisasi yang bergerak dalam dakwah Islam bagi orang-orang Tionghoa, ia juga mengintegrasikan diri dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam AD/ART PITI tahun 1980 yang menyebutkan bahwa PITI selain berasas Al-Qur'an dan Sunnah, juga berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, PITI aktif menjalankan kegiatan sosial bagi kesejahteraan umum, seperti mendirikan balai pengobatan dan rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa PITI tidak hanya bergerak sebagai organisasi Islam, tetapi juga ikut serta dalam pembangunan nasional melalui berbagai kegiatan sosial.

PITI memiliki beberapa cabang wilayah di seluruh Indonesia, salah satunya di Jawa Timur yang didirikan tahun 1988.³² PITI Jawa Timur memiliki 22 cabang DPD (Dewan Pimpinan Daerah) yang tersebar di berbagai daerah, diantaranya Surabaya, Gresik, Tuban, Sidoarjo, Bojonegoro, Nganjuk, Lamongan, Bangkalan, Kediri, dan Malang Raya. Meski memiliki fungsi yang sama, tetapi DPD memiliki tugas dan aktivitas yang berbeda. Namun, DPD PITI di masing-masing wilayah tetap

³⁰ Arief, "Sejarah dan Perkembangan PITI," 1.

³¹ Junus Jahja, *Sang Pemula Karim Oei Nasionalis Indonesia, Muslim Taat, dan Pengusaha Sukses* (Jakarta: Yayasan Haji Karim Oei, 2005), 3.

³² H. Haryanto Satryo, dalam sebuah wawancara dengan penulis, 5 Oktober 2018.

berada di bawah arahan DPW. Berbeda dengan PITI Pusat, PITI Jawa Timur tidak berpolitik praktis.³³ PITI Jawa Timur juga dianggap memiliki eksistensi tinggi dibanding dengan PITI di wilayah lain. Hal ini nampak dengan kehadiran PITI Jawa Timur sebagai penggagas Masjid Cheng Hoo di Indonesia.

Konjen Tiongkok di Surabaya mengatakan bahwa tidak ada hubungan atau kedekatan khusus yang dimiliki oleh pemerintah Tiongkok dengan PITI karena pemerintah Tiongkok menganggap PITI sama dengan organisasi masyarakat lainnya seperti Nahdlatul ‘Ulama (NU) dan Muhammadiyah.³⁴ Namun, beberapa data yang penulis temukan menunjukkan bahwa posisi PITI tidak sama dengan keberadaan NU dan Muhammadiyah. Pertama, dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Pengurus Wilayah NU untuk menanggapi isu Uighur tahun 2019, posisi PITI adalah menjadi media antara PWNU dan pemerintah Tiongkok.³⁵ Jika posisi PITI sama dengan posisi NU dan Muhammadiyah, PITI seharusnya bukan menjadi media penghubung, melainkan pihak yang membutuhkan penjelasan. Kedua, dalam pembentukan Pusat Studi Indonesia-Tiongkok di UIN Sunan Ampel, PITI telah menjadi media perantara kerjasama antara pihak kampus dan Konjen Tiongkok di Surabaya.³⁶ Pembentukan Pusat Studi Indonesia-Tiongkok ini merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah Tiongkok, di mana ia menjadi sarana bagi para mahasiswa dan akademisi untuk mempelajari hubungan Indonesia-Tiongkok serta kebudayaan Tiongkok. Pusat studi ini juga dapat digunakan sebagai media diplomasi publik pemerintah Tiongkok di Indonesia. Keikutsertaan dalam pembentukan pusat studi tersebut menunjukkan bahwa PITI mampu menghubungkan pihak-pihak di

³³ H. Abdullah Nurawi (Ketua Umum Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo), dalam sebuah wawancara dengan penulis, 7 Agustus 2019.

³⁴ Xu Lian (Staf Konjen Tiongkok Surabaya), dalam sebuah wawancara dengan penulis, Februari 2019.

³⁵ H. Haryanto Satryo, dalam sebuah wawancara dengan penulis, 26 Maret 2019.

³⁶ Ridha Amaliyah (Ketua Pusat Studi Indonesia-Tiongkok UIN Sunan Ampel Surabaya), dalam sebuah wawancara dengan penulis, 22 Maret 2019.

Indonesia dengan pemerintah Tiongkok. Dengan kata lain, PITI dipercaya serta diakui keberadaannya oleh pemerintah Tiongkok.

Hubungan Indonesia-Tiongkok tidak hanya sebatas hubungan diplomatik. Sejarah yang panjang membuat hubungan keduanya erat hingga ke akar rumput (*grassroots*). Adanya populasi Tionghoa di tengah masyarakat Indonesia membuat keterkaitan kedua negara ini semakin tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa etnis Tionghoa sendiri telah menjadi bagian panjang dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, hubungan Indonesia-Tiongkok dari aspek *grassroots* tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia saat ini. Menurut sejarawan Agus Sunyoto, ketika orang-orang muslim Tiongkok datang ke Indonesia, para pribumi masih memiliki kepercayaan menyembah batu dan pohon-pohon.³⁷

Rezsa Maulana mengungkapkan bahwa jejak-jejak Islam Tionghoa di Indonesia dan Islam Nusantara tak bisa dinegasikan. Jejak-jejak kebudayaan Tiongkok dan Tionghoa muslim juga banyak bertebaran di Indonesia. Mulai dari bahasa, arsitektur, konsepsi spiritual dan keduniaan, nama-nama jalan, aneka aksesoris pakaian, hingga nama makanan.³⁸ Sumanto Al-Qurtubi mengatakan bahwa eksistensi Tionghoa muslim pada awal perkembangan Islam di Jawa tidak hanya ditunjukkan dengan adanya tradisi lisan, sumber-sumber Tiongkok, teks lokal Jawa, maupun kesaksian-kesaksian pengelana asing. Terdapat pula bukti peninggalan purbakala Islam di Jawa, seperti ukiran padas di masjid kuno Mantingan Jepara, menara masjid di Pecinan Banten, dan arsitektur keratin Cirebon beserta Taman Sunyaragi.³⁹ Hubungan ini juga nampak jelas dengan keberadaan PITI sebagai salah satu organisasi Islam bagi masyarakat Tionghoa muslim di Indonesia yang tidak hanya

³⁷ Agus Sunyoto (sejarawan), dalam sebuah wawancara dengan penulis, 1 Desember 2018.

³⁸ Rezsa Maulana, *Tionghoa Muslim/Muslim Tionghoa* (Yogyakarta: IMPULSE, 2010).

³⁹ Sumanto Al-Qurtubi, *Arus Tiongkok-Jawa Islam: Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV & XVI* (Yogyakarta: INSPEAL dan INTI, 2003).

berfungsi sebagai lembaga dakwah di kalangan etnis Tionghoa, melainkan juga lembaga sosial kemasyarakatan. Keberadaan Masjid Cheng Hoo di sejumlah kota besar di Indonesia pun menjadi bukti kedekatan Tiongkok dengan masyarakat Indonesia.⁴⁰ Keberadaan PITI sering kali diidentikkan dengan Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo. Meski keduanya memiliki struktur yang berbeda, namun sebenarnya dapat dikatakan bahwa antara PITI dan Yayasan Haji Muhammad Cheng hoo memiliki kegiatan dan tujuan yang sama. Satriyo menambahkan bahwa PITI merupakan ibu dari Yayasan Cheng Hoo.⁴¹

Hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional masing-masing negara. Sebagaimana Indonesia memiliki kepentingan nasional dalam hubungannya dengan Tiongkok, begitu pun sebaliknya. Penulis berpendapat bahwa Tiongkok memiliki dua kepentingan terhadap Indonesia. Pertama, kepentingan nasional ekonomi Tiongkok terhadap Indonesia. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terpenting ASEAN yang ditandai dengan disepakatinya *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA). ACFTA merupakan kesepakatan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif atau nontarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Tiongkok.⁴² Data statistik perdagangan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan Tiongkok, terlebih setelah berlakunya ACFTA.⁴³ Dengan jumlah populasi dan pasar terbesar di kawasan Asia Tenggara, tidak mengherankan jika Indonesia menjadi partner penting bagi Tiongkok. Hubungan baik dengan Indonesia dapat memudahkan Tiongkok mendistribusikan produk-produknya ke pasar lokal. Dengan demikian,

⁴⁰ Mahfud, "The Role of Cheng Ho Mosques."

⁴¹ H. Haryanto Satriyo, dalam sebuah wawancara dengan penulis, 1 April 2019.

⁴² "ASEAN-China Free Trade Area," Direktorat Kerjasama Regional Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Februari 2010.

⁴³ Sigit Setiawan, "ASEAN-China FTA: Dampaknya terhadap Ekspor Indonesia dan Cina," *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 6, no. 2 (2012): 129-150.

usaha-usaha Tiongkok untuk mempertahankan hubungan baik tersebut merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, yaitu mempertahankan pasar Indonesia.

Kedua, kepentingan Tiongkok dalam konstelasi perebutan kekuasaan dan kekuatan dunia. Kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan baru dunia menyebabkan kekhawatiran negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Indonesia pun tidak luput dari persaingan ini. Perebutan pengaruh oleh Tiongkok dan Amerika Serikat kepada Indonesia jelas sangat terlihat. Pada bulan Oktober 2010, delegasi Tiongkok melakukan kunjungan tiga hari ke Jakarta. Selama kunjungan tersebut, Tiongkok menjanjikan investasi sebesar US\$6,6 milyar dengan pengembangan infrastruktur sebagai program utama.⁴⁴ Tidak lama berselang, Presiden Amerika Serikat Barrack Obama tiba di Jakarta pada tanggal 6 November 2010 untuk meresmikan *the United States-Indonesia Comprehensive Partnership*. Perebutan kekuasaan dunia oleh Amerika Serikat dan Tiongkok menjadikan Indonesia sebagai objek perebutan pengaruh antara keduanya. Oleh karena itu, penting bagi Tiongkok untuk mempertahankan serta mempererat hubungannya dengan Indonesia.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Tiongkok adalah persepsi negatif yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia bukan hanya terhadap negara Tiongkok, tetapi juga etnis Tionghoa. Survei Wahid Foundation tahun 2017 menunjukkan bahwa etnis Tionghoa adalah kelompok yang dibenci oleh masyarakat.⁴⁵ Hal ini dikarenakan etnis Tionghoa, meski telah berkewarganegaraan Indonesia, masih sering dikaitkan dengan Tiongkok yang dianggap sebagai ancaman bagi Indonesia. Hasil survei tahun 2017 oleh Media Survei Nasional (Median) tentang persepsi publik terhadap ancaman dari luar negeri menyatakan bahwa masyarakat menilai Tiongkok sebagai negara

⁴⁴ Rahul Mishra dan Irfa Puspita Sari, *Indonesia-China Relations: Challenges and Opportunities* (Surabaya: IDSA Issue Brief, 2010).

⁴⁵ Palupi Annisa Auliani, "Tionghoa, antara Sasaran Kebencian dan Ketimpangan Sosial," *Kompas*, 22 Februari 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/14163721/tionghoa-antara-sasaran-kebencian-dan-ketimpangan-sosial>

yang paling mengancam Indonesia.⁴⁶ Median juga melakukan jajak pendapat terhadap konstituen partai politik besar. Sejalan dengan hasil survei sebelumnya, konstituen semua parpol di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganggap Tiongkok sebagai ancaman yang serius bagi Indonesia.⁴⁷ Ada beberapa alasan yang mendasari kekhawatiran publik Indonesia terhadap Tiongkok: 31,2% menyatakan bahwa Tiongkok menguasai ekonomi Indonesia, 23,7% melihat produk-produk Tiongkok terlalu dominan di Indonesia, dan 7,5% menentang komunisme.⁴⁸

Persepsi buruk terhadap Tiongkok tentu berpengaruh terhadap hubungan bilateralnya dengan Indonesia, apalagi sentimen anti-Tiongkok ini ikut serta memengaruhi perpolitikan Indonesia, terutama setelah Pemilu tahun 2014. Sentimen anti-Tiongkok menyebar secara cepat melalui media sosial. Leo Suryadinata menyatakan bahwa cerita itu disajikan seolah-olah terdapat “konspirasi” Tiongkok untuk merusak ekonomi Indonesia.⁴⁹ Kasus penistaan agama yang menimpa Ahok pada pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 pun tidak terlepas dari adanya sentimen ini. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Indonesia terhadap keberadaan orang-orang Tionghoa masih diwarnai adanya sentimen anti-Tiongkok. Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia mengecam penggunaan berita palsu yang disangkutpautkan dengan pemerintahan di Beijing dalam kampanye pemilu.⁵⁰ Diplomasi publik menjadi salah satu ujung tombak kebijakan pemerintah Tiongkok

⁴⁶ Ali Mansur, “Survei Median: Cina Paling ‘Mengancam’ Indonesia,” *Republika*, 15 November 2017, <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/11/15/ozg6r7377-survei-median-cina-paling-mengancam-indonesia>

⁴⁷ Nur Habibie, “Survei Median: Konstituen Semua Parpol di DPR Anggap China Jadi Ancaman Serius RI,” *Merdeka*, 15 November 2017, <https://www.merdeka.com/politik/survei-median-konstituen-semua-parpol-di-dpr-anggap-china-jadi-ancaman-serius-ri.html>

⁴⁸ Seysha Desnikia, “Survei: Masyarakat RI Persepsikan China Jadi Ancaman Terbesar,” *Detik News*, 15 November 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3727919/survei-masyarakat-ri-persepsikan-china-jadi-ancaman-terbesar>

⁴⁹ Leo Suryadinata, “Anti-China Campaign in Jokowi’s Indonesia,” *The Straits Times*, 10 Januari 2017, <https://www.straitstimes.com/opinion/anti-china-campaign-in-jokowis-indonesia>

⁵⁰ Ibid.

untuk melawan persepsi buruk masyarakat Indonesia. PITI pun turut memainkan peran penting dalam diplomasi publik Tiongkok.

Meskipun memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah Tiongkok, PITI Jawa Timur tidak mempunyai kepentingan politik terkait hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok. Ketua PITI Jawa Timur menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan untuk memberikan jawaban atau penjelasan atas isu-isu yang menyangkut pemerintah Tiongkok, apalagi yang berhubungan dengan isu-isu politik, kecuali jikadiminta dan dibutuhkan sebagai mediator.⁵¹ Menurut Abdullah Nurawi, hubungan yang terjalin antara PITI Jawa Timur dan pemerintah Tiongkok hanya sebatas kemanusiaan.⁵² Hal serupa disampaikan oleh Hariyono Ong bahwa tidak ada keterkaitan PITI secara politik dengan pemerintah Tiongkok.⁵³ Bambang Sujanto menambahkan, PITI hanya berperan sebagai penghubung apabila dibutuhkan untuk menghilangkan kesalahpahaman masyarakat Indonesia tentang Tiongkok.⁵⁴

Penulis menemukan bahwa diplomasi publik yang dilakukan oleh PITI tidak memiliki hubungan politik dengan pemerintah Tiongkok, yang artinya PITI melakukan diplomasi publik dengan inisiatif sendiri. Ada empat peran PITI yang dapat dikategorikan sebagai bentuk diplomasi publik:

Memperkenalkan Budaya Tiongkok. Salah satu peran PITI dalam memperkenalkan budaya Tiongkok adalah mendirikan Masjid Cheng Hoo yang didirikan pertama kali pada tanggal 15 Oktober 2001 di Surabaya atas usul HMY Bambang Sujanto bersama dengan kawan-kawan di PITI. Peresmian Masjid Cheng Hoo dilakukan pada 28 Mei 2003 oleh Prof. Dr. Said Agil Husain Al Munawar, MA sebagai Menteri Agama Republik Indonesia.

⁵¹ H. Haryanto Satryo, dalam sebuah wawancara dengan penulis, 5 Oktober 2018.

⁵² H. Abdullah Nurawi, dalam sebuah wawancara dengan penulis, 7 Agustus 2019.

⁵³ Hariyono Ong (Ketua Ta'mir Masjid Cheng Hoo Surabaya), dalam sebuah wawancara dengan penulis, 3 Agustus 2019.

⁵⁴ HMY Bambang Sujanto (Penasihat PITI Jawa Timur), dalam sebuah wawancara dengan penulis, 1 April 2019.

Arsitektur Masjid Cheng Hoo terinspirasi oleh Masjid Niu Jie di Beijing yang berdiri tahun 996 M. Gaya arsitektur tersebut menggambarkan model klinteng yang menunjukkan identitas Masjid Cheng Hoo sebagai Islam Tionghok yang berada di Indonesia dan untuk mengenang leluhur warga Tionghoa yang mayoritas memeluk agama Budha. Bagian atas bangunan utama memiliki bentuk segi delapan (*Pat Kwa*), yang mana angka delapan dalam bahasa Tionghoa disebut *fat* yang berarti jaya dan keberuntungan. Arsitektur khas Tionghok juga ditunjukkan oleh dominasi warna hijau, kuning dan merah. Dengan mengadopsi gaya arsitektur khas Tionghok pada bangunan Masjid Cheng Hoo, PITI telah memperkenalkan budaya Tionghok ke masyarakat luas. Apalagi Masjid Chenghoo sering dikunjungi oleh masyarakat domestik maupun mancanegara. Mereka yang berkunjung tidak hanya menjadikan Masjid Cheng Hoo sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai sarana beribadah dan belajar tentang arsitektur Tionghok.

Selain itu, terdapat pula program-program lain yang memperkenalkan budaya Tionghok ke masyarakat, misalnya kursus bahasa mandarin untuk umum dan klinik akupunktur Tionghok yang di sediakan oleh Masjid Cheng Hoo Surabaya. Pengenalan budaya Tionghok juga dilakukan melalui perayaan Imlek di Masjid Cheng Hoo yang dikemas dengan santunan anak yatim.⁵⁵

Memperkenalkan Identitas Tionghoa Muslim. Masjid Cheng Hoo menjadi ikon baru wisata religi komunitas Tionghok Muslim di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia.⁵⁶ Pendiri Yayasan Masjid Haji Muhammad Cheng Hoo Surabaya, Bambang Sujanto, mengatakan bahwa Masjid Cheng Hoo dibangun dengan konsep tanpa pintu sebagai simbol keterbukaan.⁵⁷ Ini berarti bahwa siapa pun dari etnis mana pun dapat menggunakan masjid tersebut untuk beribadah dan kegiatan keagamaan

⁵⁵ Hariyono Ong, dalam sebuah wawancara dengan penulis, 3 Agustus 2019.

⁵⁶ Choirul Mahfud, "Masjid Cheng Hoo Sebagai Jalur Sutra Baru," *Radar Surabaya*, 11 September 2013, 2.

⁵⁷ Mahfud, "The Role of Cheng Ho Mosque."

lainnya. Ia menambahkan bahwa bangunan Masjid Cheng Hoo di beberapa daerah adalah bagian dari misi Tionghoa muslim Indonesia untuk memberikan kontribusi, menegosiasikan, dan memperkuat identitas dan peran mereka layaknya organisasi masyarakat sipil Islam lainnya. Misi ini dianggap cukup berhasil karena dukungan masyarakat luas.⁵⁸ Ali Karim Oe mengatakan bahwa kehadiran Tionghoa muslim setara dengan kehadiran muslim lainnya di Indonesia.⁵⁹ Pembentukan Masjid Cheng Hoo diharapkan memiliki dampak positif terhadap hubungan antara Indonesia dan Tiongkok di semua aspek kehidupan.

Selain itu terdapat pula program-program lain untuk memperkenalkan identitasnya sebagai muslim di Indonesia. Program-program tersebut antara lain: pembinaan muallaf, buka puasa bersama anak yatim, lomba MTQ Nasional yang diikuti oleh masjid Cheng Hoo seluruh Indonesia, pengajian mingguan dan bulanan untuk Tionghoa muslim maupun non-Tionghoa muslim, perayaan Hari Besar Islam seperti Idul Adha, khitanan massal, serta sholat jum'at berjama'ah. Pada peringatan HUT ke-16 Masjid Cheng Hoo, PITI meresmikan pemakaman Tionghoa muslim di Sukorejo, Pandaan, Jawa Timur. Selain itu, PITI juga melakukan sinergi dengan Pondok Pesantren Al-Amin, Parenduan Sumenep, Madura dalam pemberdayaan ekonomi umat serta menjalin kerjasama dengan berbagai pengusaha dan komunitas untuk membantu masyarakat kurang beruntung setiap Ramadan.⁶⁰

PITI melalui Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo di Surabaya juga memiliki agenda pertukaran ulama dari Indonesia ke Tiongkok dan sebaliknya. Ulama dari organisasi Islam, seperti NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), rutin diundang oleh masjid Cheng Hoo untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam program tersebut. Selain itu, ketiga organisasi Islam ini juga diundang untuk

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Hariyono Ong, dalam sebuah wawancara dengan penulis, 3 Agustus 2019.

berkunjung ke Tiongkok.⁶¹ Kunjungan serupa juga dilakukan oleh muslim Tiongkok ke Masjid Cheng Hoo. Misalnya, pada tahun 2015 lalu terdapat tiga orang muslim Tiongkok yang berkunjung ke Masjid Cheng Hoo untuk menjelaskan tentang perkembangan Islam di Tiongkok.⁶² Adanya program silaturahmi antara muslim dari kedua negara tentu dapat meningkatkan pemahaman dan pengertian di antara keduanya. Selain itu, program ini juga ikut membantu mempererat hubungan antara PITI dengan organisasi Islam lain, seperti NU dan Muhammadiyah, sehingga membantu PITI dalam melakukan diplomasi publik ke masyarakat Indonesia.

Kontribusi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat. Dalam konteks sosial, PITI memiliki beberapa program yang ditujukan tidak hanya untuk etnis Tionghoa, tetapi juga masyarakat umum. Pertama, PITI melalui Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo mendirikan TK dan Istana Balita (ISBA), di mana para murid dibiasakan menggunakan empat bahasa, yaitu Arab, Inggris, Mandarin, dan Indonesia. Kedua, PITI berpartisipasi dalam membantu korban bencana alam di Indonesia. Misalnya, pada HUT Ke-16 masjid Cheng Hoo memberikan sumbangan sebesar Rp600 juta untuk korban gempa Palu dan Rp200 juta untuk gempa Sapuda Madura. Bahkan acara ini juga dihadiri oleh pihak Konjen Tiongkok Surabaya. Ketiga, PITI memberikan layanan *medical check-up* dengan harga terjangkau untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan ini dilakukan oleh PITI melalui Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo yang bekerjasama dengan Laboratorium Pacar pada tanggal 18-19 Agustus 2018. Keempat, PITI melalui Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo bekerjasama dengan Asosiasi Akupresur seluruh Indonesia (AAKSI) melakukan pelatihan terhadap masyarakat umum. Pada tahun 2018, PITI melaksanakan program ini untuk angkatan ke-3 yang diikuti oleh 18 peserta. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendidik masyarakat agar bisa menjaga kesehatan secara mandiri sekaligus

⁶¹ Ibid.

⁶² Burnadi Hasan, *Indahnya Perbedaan: Sejarah Berdirinya Masjid Haji Cheng Hoo* (Surabaya: Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo, 2016), 54.

menyehatkan sesama.⁶³ Kelima, bekerjasama dengan Karaoke Harmoni Club, PT Matahari Sakti, dan Palang Merah Indonesia, PITI mengadakan acara donor darah di Masjid Cheng Hoo.⁶⁴

Peran PITI dalam hal sosial kemasyarakatan ini pernah diliput oleh media Tiongkok, XMG (*Xiamen Media Group Center*). PITI dianggap sangat menarik karena menggunakan nama Masjid Cheng Hoo serta dianggap berkontribusi positif bagi masyarakat.⁶⁵ Selain itu, untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan ini, PITI memiliki majalah *Cheng Hoo* serta sebuah situs beralamat <http://chenghoo.co/susunan-pengurus-dpw-piti-jawa-timur/>. Majalah dan situs ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mengetahui lebih banyak tentang PITI, Masjid Cheng Hoo, dan kontribusinya. Besarnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PITI menjadi indikasi bahwa semakin banyak orang yang mengetahui tentang keberadaan komunitas Tionghoa muslim di Indonesia yang peduli terhadap masyarakat dan menjadi bagian dari Indonesia.

Mediator antara Pemerintah Tiongkok dan Berbagai Pihak di Indonesia. Posisi PITI yang strategis sebagai organisasi Islam Tionghoa menjadikannya dekat baik dengan pemerintah Tiongkok maupun Indonesia. Ketua PITI Jawa Timur, Haryanto, mengatakan bahwa jika terdapat permasalahan terkait orang Tionghoa, maka PITI akan menjelaskan kepada pihak NU dan Muhammadiyah.⁶⁶ Kemampuan PITI sebagai penghubung atau jembatan antara pemerintah Tiongkok dengan berbagai pihak di Indonesia salah satunya ditunjukkan dengan penyelenggaraan Konferensi Pers di PWNU Jawa Timur tentang isu Uighur pada tanggal 13 Desember 2018, di mana PITI menjadi media yang mempertemukan PWNU Jatim dengan Konjen

⁶³ "Pengakuan Dunia yang Perlu Dukungan," *Majalah Cheng Ho* 99 (15 Agustus-15 Oktober 2018).

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ H. Haryanto Satryo, dalam sebuah wawancara dengan penulis, 26 Maret 2019.

RRT.⁶⁷ Soal Uighur merupakan isu yang sangat disorot dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Aksi berdemo di depan gedung Kedutaan Besar Tiongkok atau protes di media sosial atas dasar solidaritas umat muslim di Indonesia terhadap umat muslim di Tiongkok, khususnya Uighur yang dianggap mendapatkan diskriminasi, membuat pemerintah Tiongkok tersudut. Pelaksanaan konferensi pers untuk menjelaskan isu Uighur menunjukkan peran sentral PITI sebagai perantara pemerintah Tiongkok dengan pihak lain di Indonesia.

PITI juga ikut berperan dalam proses berdirinya Pusat Studi Indonesia-Tiongkok di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai perantara pihak kampus dengan pemerintah Tiongkok yang diwakili oleh Konjen Tiongkok di Surabaya.⁶⁸ Hal serupa diungkapkan oleh Haryanto.⁶⁹ Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian, menyampaikan bahwa pemerintah Tiongkok akan mendukung dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh pusat studi tersebut.⁷⁰ Dibentuknya Pusat Studi Indonesia-Tiongkok tentu sangat menguntungkan bagi pemerintah Tiongkok. Kehadiran pusat studi ini menciptakan sebuah ruang belajar bagi para mahasiswa untuk memahami budaya Tiongkok, sehingga segala kesalahpahaman atau pandangan buruk terhadap Tiongkok dapat terkikis.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa PITI Jawa Timur memiliki empat peran sebagai bentuk diplomasi publik: memperkenalkan budaya Tiongkok kepada masyarakat Indonesia, memperkenalkan identitas Tionghoa muslim, memberikan kontribusi dalam kehidupan sosial masyarakat, serta menjadi mediator antara pemerintah Tiongkok dan berbagai pihak di Indonesia. Meski terdapat peran-peran PITI dalam diplomasi publik

⁶⁷ "Bahas Isu Muslim Uighur, YMHCI-PITI Mediasi PWNU Jatim dengan Konjen RRT," *Web Chenchoo*, 13 Desember 2018, <https://chenghoo.co/2018/12/13/yhmci-piti-inventarisir-kebakaran-kapasan/>

⁶⁸ Ridha Amaliyah, dalam sebuah diskusi dengan penulis, 22 Maret 2019.

⁶⁹ H. Haryanto Satryo, dalam sebuah wawancara dengan penulis, 26 Maret 2019.

⁷⁰ Xiao Qian (Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia), dalam sebuah kunjungan di Masjid Ampel Surabaya, 10 Maret 2019.

yang dapat membantu pemerintah Tiongkok, namun PITI merupakan organisasi Islam yang berdiri sendiri tanpa berpolitik praktis. Dengan kata lain, diplomasi publik PITI tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri dan tidak terikat pada pihak manapun.

Referensi

- Al-Qarani, Lutfiya. “Dampak Sosial dan Budaya pada Perjanjian *Strategic Partnership Agreement* Indonesia-Tiongkok terhadap Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Jawa Timur.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Al-Qurtubi, Sumanto. *Arus Tiongkok-Jawa Islam: Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV & XVI*. Yogyakarta: INSPEAL dan INTI, 2003.
- Arief, Khozyn. “Sejarah dan Perkembangan PITI: Kiprah PITI di Gelanggang Nasional.” *Pembina* (1993).
- “ASEAN-China Free Trade Area.” Direktorat Kerjasama Regional Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Februari 2010.
- Auliani, Palupi Annisa. “Tionghoa, antara Sasaran Kebencian dan Ketimpangan Sosial.” *Kompas*. 22 Februari 2018.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/14163721/tionghoa-antara-sasaran-kebencian-dan-ketimpangan-sosial>
- “Bahas Isu Muslim Uighur, YMHCI-PITI Mediasi PWNU Jatim dengan Konjen RRT.” *Web Chenghoo*. 13 Desember 2018.
<https://chenghoo.co/2018/12/13/yhmci-piti-inventarisir-kebakaran-kapasan/>
- Budisetyagraha, H. “Dakwah Islam di Kalangan Etnis Tionghoa untuk Mengokohkan Integrasi Bangsa.” *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 1, no. 1 (2000): 19-27.

- Creswell, John M. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Darini, Ririn. "Nasionalisme Etnis Tionghoa di Indonesia, 1900-1945." *MOZAIK* 3, no. 1 (2008): 1-12.
- Desnikia, Seysha. "Survei: Masyarakat RI Persepsikan China Jadi Ancaman Terbesar." *Detik News*. 15 November 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3727919/survei-masyarakat-ri-persepsikan-china-jadi-ancaman-terbesar>
- Diamond, Louise dan John McDonald. *Multi-track Diplomacy: A System Approach to Peace, Third Edition*. New York: Kumarian Press, 1996.
- Fahiroh, Zakiyatul. "Pelaksanaan Dakwah Organisasi Persatuan Islam Tionghoa (PITI) Banyumas." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2016.
- Galih, Bayu. "Peran Gus Dur di Balik Kemeriahan Imlek." *Kompas*. 30 Januari 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/30/06060031/peran.gus.dur.di.balik.kemeriahan.imlek>.
- Habibie, Nur. "Survei Median: Konstituen Semua Parpol di DPR Anggap China Jadi Ancaman Serius RI." *Merdeka*. 15 November 2017. <https://www.merdeka.com/politik/survei-median-konstituen-semua-parpol-di-dpr-anggap-china-jadi-ancaman-serius-ri.html>
- Harahap, Abdi Sahrial. "Dinamika Gerakan Dakwah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Medan, Sumatera Utara." *Analytica Islamica* 1, no. 2 (2012): 215-241.
- Hasan, Akhmad Muawal. "Sentimen Anti-Cina di Indonesia Awet Usai Pilkada Jakarta." *Tirto*. 12 September 2017. <https://tirto.id/sentimen-anti-cina-di-indonesia-awet-usai-pilkada-jakarta-cwpg>

- Hasan, Burnadi. *Indahnya Perbedaan: Sejarah Berdirinya Masjid Haji Cheng Hoo*. Surabaya: Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo, 2016.
- Hennida, Citra. *Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri*. Surabaya: Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga.
- Hikam, Muhammad A. S. *Politik Kewarganegaraan: Landasan Pendemokratisasi di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1999).
- Jahja, Junus. *Sang Pemula Karim Oei Nasionalis Indonesia, Muslim Taat, dan Pengusaha Sukses*. Jakarta: Yayasan Haji Karim Oei, 2005.
- Kupinska, Karolina. "Contemporary Multi-track Diplomacy across the Taiwan Strait." Tesis Magister, Graduate School of International Affaris, Ming Chuan University, 2010.
- Mahfud, Choirul. "Masjid Cheng Hoo Sebagai Jalur Sutra Baru." *Radar Surabaya*, 11 September 2013.
- Mahfud, Choirul. "The Role of Cheng Ho Mosque: The New Silk Road, Indonesia-China Relations in Islamic Cultural Identity." *Journal of Indonesian Islam* 8, no. 1 (2014): 23-38.
- Maleong, Laxi. *Meode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya, 1994.
- Mansur, Ali. "Survei Median: Cina Paling 'Mengancam' Indonesia." *Republika*. 15 November 2017. <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/11/15/ozg6r7377-survei-median-cina-paling-mengancam-indonesia>
- Mapendere, Jeffrey. "Track One and a Half Diplomacy and the Complementarity of Tracks." *Culture of Peace Online Journal* 2, no. 1 (2006): 66-81.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Maulana, Rezza. *Tionghoa Muslim/Muslim Tionghoa*. Yogyakarta: IMPULSE, 2010.
- Mishra, Rahul dan Irfa Puspita Sari. *Indonesia-China Relations: Challenges and Opportunities*. Surabaya: IDSA Issue Brief, 2010.

- Muhyidin, Moh. "Peran PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) terhadap Islamisasi di Indonesia." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Nye, Joseph S. "Public Diplomacy and Soft Power." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 616, no. 1 (2008): 94-109.
- "Pengakuan Dunia yang Perlu Dukungan." *Majalah Cheng Ho* 99 (15 Agustus-15 Oktober 2018).
- PITI. *AD/ART/PITI Tahun 2012-2017*.
- Putra, Surya. *Agamaku Terbang Tinggi*. Surabaya: Inspirasi, 2001.
- Rosmini, Syamsidar, dan Haniah. *Geliat Keberagaman Moderat Komunitas Muslim Tionghoa: Studi Kontribusi Pengkajian Islam Intensif dalam Keberagaman Moderat Muslim Tionghoa Kota Makassar*. Makassar: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Rumah Buku Carabaca, 2015.
- Rustopo. *Jawa Sejati, Otobiografi Go Tik Swan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008.
- Setiawan, Sigit. "ASEAN-China FTA: Dampaknya terhadap Ekspor Indonesia dan Cina." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 6, no. 2 (2012): 129-150.
- Subagyo P., Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sukma, Rizal. "Hubungan Indonesia-Tionghoa: Jalan Panjang Menuju Normalisasi." Dalam Bantarto Bandoro, *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*. Jakarta: CSIS, 1994.
- Suryadinata, Leo. "Anti-China Campaign in Jokowi's Indonesia." *The Straits Times*. 10 Januari 2017. <https://www.straitstimes.com/opinion/anti-china-campaign-in-jokowis-indonesia>
- Wahyudi, Johan. "Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Semarang 1986-2007." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Wehrenfenning, Daniel. "Multi-track Diplomacy and Human Security." *Human Security Journal* 7, no. 7 (2008): 80-86.